

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Perjalanan politik Joko Widodo dapat dipahami sebagai proses bertahap yang selaras dengan tahapan kekuasaan dalam *Il Principe*. Pada fase awal sebagai *il principe nuovo*, Jokowi membangun legitimasi melalui dukungan rakyat dan konfrontasi terhadap elite lama, terutama ketika menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Fase ini berlanjut pada transisi *virtù* dan *fortuna* saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, ketika Jokowi memanfaatkan momentum politik untuk melakukan loncatan kekuasaan ke tingkat nasional. Setelah terpilih sebagai presiden, Jokowi memasuki fase *stato nuovo instabile*, di mana kekuasaannya belum mapan dan menuntut penggunaan langkah-langkah keras yang terukur untuk stabilisasi. Strategi tersebut kemudian bergeser pada fase *spegnerne i nemici*, ditandai oleh kooptasi oposisi dan perluasan koalisi sebagai cara meredam potensi ancaman terhadap rezim.

Memasuki periode kedua, praktik kekuasaan Jokowi semakin mencerminkan fase *assoluta potestà del principe*, ketika kekuasaan eksekutif telah terkonsolidasi secara dominan dan relatif tak tertandingi. Pada tahap ini, hukum, institusi negara, dan aparat penegak hukum berfungsi sebagai instrumen pengamanan kekuasaan, bukan sebagai mekanisme pembatas. Orientasi tersebut kemudian berkembang pada fase *stato ereditario*, yakni upaya memastikan kesinambungan pengaruh pascakekuasaan melalui pembentukan jaringan loyalis dan penyiapan penerus politik. Dengan demikian, rangkaian fase ini menunjukkan bahwa pragmatisme politik Jokowi bukanlah fenomena insidental, melainkan praktik Machiavellian yang sistematis dan adaptif, di mana strategi kekuasaan terus berubah mengikuti kebutuhan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mewariskan kekuasaan, sebagaimana dirumuskan oleh Niccolò Machiavelli dalam *Il Principe*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik Joko Widodo sepanjang masa kepemimpinannya tidak dapat dipahami hanya sebagai dinamika demokratis yang wajar, tetapi sebagai proses konsolidasi kekuasaan yang sarat dengan kalkulasi

Machiavellian. Penggunaan teori Machiavelli membantu mengungkap struktur konseptual yang selama ini menyelimuti berbagai kebijakan dan strategi politik Jokowi, sehingga wajah pragmatisme dan populisme pemerintahan lebih terlihat secara telanjang dan kritis.

Pertama, proses perolehan kekuasaan Jokowi sejak 2014 merupakan contoh bagaimana populisme digunakan sebagai kendaraan legitimasi sekaligus strategi untuk menembus dominasi elit politik. Jokowi membangun citra kesederhanaan dan kedekatan simbolis dengan rakyat sebagai modal politik yang efektif. Strategi pencitraan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk meraih dukungan dari kelompok masyarakat yang frustrasi terhadap elit lama. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa populisme tersebut tidak selalu membawa agenda transformasi yang substantif. Populisme lebih berfungsi sebagai kemasan moral yang menutupi absennya platform ideologis yang stabil. Dalam perspektif Machiavelli, strategi ini mencerminkan penggunaan *apparenza* sebagai alat untuk meraih kekuasaan meskipun realitas politiknya jauh lebih kompleks dan penuh kalkulasi.

Kedua, setelah kekuasaan diraih, pola relasi politik yang dibangun Jokowi menunjukkan perubahan signifikan dari narasi moralitas awal menuju politik konsolidasi yang pragmatis dan terkadang oportunistik. Konsolidasi tersebut berlangsung melalui kooptasi aktor politik, penetrasi terhadap lembaga-lembaga negara, penguatan patronase ekonomi, serta reduksi oposisi. Langkah ini memperlihatkan bahwa stabilitas politik dianggap lebih penting daripada penguatan mekanisme check and balances. Pola tersebut sejalan dengan prinsip *virtù* Machiavelli yang menempatkan kelangsungan kekuasaan sebagai prioritas utama. Pengelolaan loyalitas elite melalui insentif ekonomi, proyek infrastruktur, dan jabatan strategis memperlihatkan digunakannya *amore*. Sementara itu, rotasi jabatan dan penggunaan tekanan birokratis menunjukkan hadirnya unsur *paura*. Kombinasi kedua instrumen tersebut memperkuat struktur kekuasaan yang sulit ditandingi oleh oposisi maupun aktor politik lain.

Ketiga, kebijakan publik pada masa Jokowi tidak dapat dibaca sebagai program yang netral atau teknokratis, tetapi sebagai perangkat politik yang diarahkan untuk

memastikan stabilitas kekuasaan. Pembangunan infrastruktur menjadi contoh paling jelas. Proyek-proyek besar digunakan sebagai simbol keberhasilan negara. Namun, pembangunan tersebut juga berfungsi untuk mengkonsolidasikan dukungan elite bisnis dan memperluas pengaruh pemerintah ke sektor-sektor strategis. Hal ini selaras dengan pemikiran Machiavelli yang menekankan pentingnya tindakan yang tampak oleh publik untuk memperkuat otoritas penguasa. Dengan kata lain, kebijakan publik bekerja sebagai panggung kuasa yang menyatukan kebutuhan legitimasi publik dan kepentingan patronase elite.

Keempat, puncak penerapan logika Machiavellian dalam pemerintahan Jokowi tampak dalam cawe-cawe politik pada Pemilu 2024. Intervensi terhadap proses suksesi, dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran, serta normalisasi peran politik keluarga menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dipandang sebagai masa jabatan yang memiliki batas temporal. Kekuasaan diperlakukan sebagai struktur pengaruh yang harus terus diwariskan melalui penataan jaringan politik yang strategis. Tindakan ini mencerminkan aspek paling kontroversial dari pemikiran Machiavelli, yaitu pembenaran tindakan non-moral atas dasar stabilitas politik. Namun, praktik tersebut menimbulkan konsekuensi serius bagi kualitas demokrasi. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa cawe-cawe Jokowi berkontribusi pada melemahnya independensi lembaga negara, meningkatnya ketergantungan elite terhadap patronase eksekutif, serta menyempitnya ruang kompetisi politik yang sehat.

Kelima, penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan Jokowi menghadirkan paradoks besar. Di satu sisi, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, adaptif, dan fokus pada pembangunan. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi menunjukkan pola-pola konsolidasi kekuasaan yang mengikuti logika Machiavellian, terutama dalam hal penggunaan institusi negara, kontrol terhadap persepsi publik, dan pengelolaan elite melalui patronase. Paradoks ini memperlihatkan bahwa demokrasi prosedural dapat menjadi wadah yang subur bagi praktik konsolidasi kekuasaan yang tidak selalu sejalan dengan nilai demokrasi substantif.

Sebagai penutup dari keseluruhan analisis, penting untuk menempatkan praktik politik Joko Widodo dalam sebuah kerangka kronologis yang memperlihatkan

pergeseran strategi kekuasaan secara bertahap. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih utuh terhadap bagaimana kekuasaan tidak dijalankan secara statis, melainkan terus beradaptasi mengikuti posisi, tantangan, dan tingkat stabilitas rezim.

Pertanyaan terakhir yang muncul pada penelitian ini adalah, dengan begitu banyaknya praktik politik machiavellis yang dilakukan, apakah Joko Widodo memang membaca *Il Principe* dan menjadikannya sebagai buku pegangan? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Secara spekulatif akan menjadi wajar apabila Jokowi memang membaca *Il Principe*, akan tetapi apabila Jokowi tidak membaca dan bertindak sebagai seorang Machiavellian secara natural dan naluriah, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Jokowi adalah bentuk mutakhir dari pemikiran politik Niccolo Machiavelli itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa hal Jokowi telah menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terletak pada teori machiavellisme.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Joko Widodo tidak hanya menggambarkan pragmatisme politik, tetapi juga menunjukkan bahwa teori Machiavelli tetap sangat relevan dalam membaca dinamika kekuasaan kontemporer. Kekuasaan pada era demokrasi modern tidak selalu bergerak melalui kekerasan terbuka. Namun, tetap dapat bertumpu pada manipulasi simbolik, penguatan jaringan patronase, dan pengelolaan struktur institusional. Penelitian ini kemudian memberikan gambaran bahwa politik Indonesia berada pada persimpangan antara demokrasi prosedural dan konsolidasi kekuasaan yang pragmatis, sehingga membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai arah demokrasi Indonesia setelah 2024.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan kuatnya praktik Machiavellian dalam pemerintahan Joko Widodo, beberapa saran kritis dapat diajukan untuk mendorong pembacaan yang lebih jernih terhadap dinamika kekuasaan serta membuka ruang koreksi terhadap kecenderungan politik yang mengarah pada konsolidasi kekuasaan berlebihan.

Pertama, penelitian akademik perlu mengambil posisi yang lebih berani dalam menelaah bagaimana praktik populisme, patronase, dan konsolidasi eksekutif telah melemahkan demokrasi Indonesia. Banyak penelitian terdahulu masih berhenti pada analisis permukaan atau deskripsi pembangunan tanpa membedah hubungan kuasa yang bekerja di baliknya. Studi lanjutan perlu menggali struktur relasi antara bisnis, keluarga politik, elite lokal, dan aktor negara yang membentuk jaringan kekuasaan yang semakin sulit dipertanggungjawabkan secara demokratis. Analisis harus diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk otoritarianisme baru yang disembunyikan melalui retorika pembangunan dan citra kerakyatan.

Kedua, lembaga negara yang selama ini rentan terhadap kooptasi eksekutif perlu dievaluasi secara mendasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stabilitas politik pada masa Jokowi sangat bergantung pada patronase struktural, bukan penguatan institusi demokrasi. Reformasi kelembagaan harus mengarah pada pembatasan pengaruh presiden dalam pengangkatan pejabat strategis, peningkatan otonomi lembaga pengawas, serta mekanisme yang mencegah penyalahgunaan proyek infrastruktur sebagai alat konsolidasi kekuasaan. Tanpa reformasi ini, setiap pergantian pemimpin akan melahirkan pola kekuasaan yang sama atau bahkan lebih terpusat.

Ketiga, masyarakat sipil perlu memperluas ruang perlawanan terhadap penyempitan demokrasi yang berlangsung secara halus melalui retorika stabilitas dan pembangunan. Temuan penelitian menegaskan bahwa konsentrasi kekuasaan dapat terjadi tanpa represi terbuka, tetapi melalui normalisasi patronase, peredaman oposisi, dan penguasaan narasi di ruang publik. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas pers kritis perlu memperkuat posisi sebagai pengimbang politik dan tidak terjebak pada glorifikasi pembangunan yang justru menutupi melemahnya akuntabilitas negara.

Keempat, partai politik perlu dikritik secara serius karena gagal menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap eksekutif. Polarisasi semu antar partai telah memudahkan eksekutif memusatkan kekuasaan melalui kooptasi politik. Penelitian lanjutan harus menyoroti kerentanan sistem kepartaian Indonesia terhadap

patronase eksekutif serta mengeksplorasi gagasan reformasi sistemik untuk mengurangi dominasi figur tunggal dalam politik nasional.

Kelima, peneliti dan pembuat kebijakan perlu berhenti menganggap stabilitas sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pemerintahan. Stabilitas yang dibangun melalui kontrol birokrasi, ketergantungan elite, dan manipulasi citra hanya menghasilkan ketenangan semu yang rapuh. Penelitian lanjutan harus mengkaji dampak jangka panjang dari politik stabilitas terhadap kualitas kebebasan sipil, erosi oposisi, dan pembusukan institusi demokrasi. Kritik terhadap stabilitas sebagai dogma perlu diperluas agar demokrasi tidak terus-menerus dikorbankan atas nama keamanan politik.

Secara keseluruhan, saran-saran ini menekankan perlunya pembacaan yang lebih kritis terhadap pola kekuasaan yang terbentuk pada era Jokowi. Demokrasi Indonesia membutuhkan koreksi struktural agar tidak semakin tersandera oleh praktik politik yang mengutamakan efektivitas kekuasaan namun mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi substansial. Penelitian mendatang harus berperan sebagai penantang logika kekuasaan, bukan sekadar pengamat yang netral terhadap proses yang menggerus kualitas demokrasi.